




## Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel *Online* Pada Polres Maluku Tengah

Taufik Sabenjar Kalidupa<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2</sup>, Judy Marria Saimima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [sabenjarakld@gmail.com](mailto:sabenjarakld@gmail.com)

**ABSTRACT:** *This study aims to discuss Law Enforcement Against Online Togel Gambling at the Central Maluku Police and efforts to deal with online lottery gambling at the Central Maluku Police. The type of research used is empirical juridical research. Central Maluku Police research location. Population, sample and respondents Polres Investigators of Central Maluku Regency and 5 community members. Data sources are primary data and secondary data. Legal material collection techniques through interviews and documentation studies. Data processing techniques through editing and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the role of the Central Maluku Police in enforcing the law against online lottery gambling at the Central Maluku Police has been carried out in accordance with statutory provisions, but in carrying out law enforcement against online lottery gambling the role of the Police is still there are factors that influence law enforcement against online lottery gambling at the Central Maluku Police, including the legal factor itself or the law, factors of law enforcement officials, factors of facilities and infrastructure, community factors and servers placed in countries where gambling is legalized. Efforts to deal with online lottery gambling were carried out by the Central Maluku Police through preventive and repressive efforts. Preventive efforts include providing advice and counseling or outreach to schools and the community regarding online gambling and providing knowledge of the dangers and losses that can be obtained when carrying out online gambling. Repressive efforts include imposing sanctions on online togel gambling actors by applying Article 303 and/or 303 bis of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) and Article 45 of the Electronic Information and Transaction Law.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Online Togel; Central Maluku Police.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah serta upaya penanggulangan perjudian togel online pada Polres Maluku Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian Polres Maluku Tengah. Populasi, sampel dan responden Penyidik POLres Kabupaten Maluku Tengah dan 5 anggota masyarakat. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik Pengolahan data melalui editing dan Teknik Analisa data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Polres Maluku Tengah dalam penegakan hukum terhadap perjudian togel online pada Polres Maluku Tengah sudah dilaksanakan sesuai paraturan perundang-undangan, namun dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perjudian togel online peran Polres namun masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perjudian togel online pada Polres Maluku Tengah antara lain faktor hukum itu sendiri atau undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan Server yang Diletakan di Negara-Negara Melegalkan Judi. Upaya penanggulangan perjudian togel online yang dilakukan Polres Maluku Tengah melalui Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif meliputi memberikan himbauan dan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Upaya represif meliputi penerapan sanksi kepada pelaku perjudian togel online dengan menerapkan Pasal 303 dan/ atau 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum; Perjudian Togel Online; Polres Maluku Tengah.

## PENDAHULUAN

Perjudian bukanlah fenomena baru dalam budaya Indonesia, itu telah ada untuk waktu yang sangat lama dan berkembang dari waktu ke waktu. Masalah judi ini adalah masalah terkenal yang telah berubah menjadi kebiasaan yang merusak bagi orang-orang. Pada hakekatnya perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan agama dan moral serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara karena berdampak buruk bagi moral dan mental masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.<sup>1</sup>

Padahal perjudian dalam bentuk apapun dilarang oleh hukum positif Indonesia dan mempunyai akibat hukum yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP yang antara lain menyatakan bahwa kasus perjudian semakin marak seiring dengan semakin maraknya kasus perjudian. kehidupan manusia, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b) dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Perjudian sendiri memiliki berbagai macam bentuk, merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penggolongan perjudian (selanjutnya disebut PP 99 Tahun 1981) disebutkan ada beberapa bentuk perjudian meliputi: *roulete, bloch jach, lotre, tekpo, dadu, dokding, adu dara, oke, sambung ayam, dan Toto Gelap (Togel)*.<sup>2</sup> Menurut PP 99 Tahun 1981 tersebut di atas, permainan yang menyangkut memprediksi angka yang akan ditarik adalah permainan togel (toto gelap). Jika dulu bermain togel dilakukan secara *offline* yaitu dengan menuliskan angka pada secarik kertas tertentu kemudian menyerahkannya kepada bandar togel/penjual togel beserta uang pemasangannya, perkembangan dari permainan judi toto gelap tersebut. (Togel) bertepatan dengan teknologi.

Namun berkat kemajuan teknologi, pemilihan nomor togel kini menjadi lebih mudah berkat adanya penyedia jasa togel *online* (disebut juga dengan “bandar *online*”). Untuk memilih nomor lotere, seseorang hanya perlu membuat akun dengan bandar online dan kemudian menyeteror uang ke akun bandar tersebut. Hanya perangkat seluler, PC, atau laptop yang terhubung ke jaringan internet yang dapat digunakan untuk ini.<sup>3</sup> Togel online merupakan salah satu kejahatan yang biasa kita sebut sebagai kejahatan dunia maya, maka selain dijerat dengan

---

<sup>1</sup> Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016. h.43

<sup>2</sup> Sugeng Tiyarto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Semarang Universitas Diponegoro, 2006. h.32

<sup>3</sup> Denny Lautumaerissa, Carolina Tuhumury, Jetty Martje Patty, “Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)”, *Jurnal Belo*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 7 No 2 (2021), 239, <https://doi.org/10.30598/belo.vol7issue1page236-255>,

KUHP, permainan judi togel online juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Salah satu kabupaten utama di Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, tak pelak dikaitkan dengan berbagai kejahatan. Perjudian adalah salah satu dari sekian banyak kejahatan yang paling sering dilakukan masyarakat. Bentuk perjudian yang paling populer adalah perjudian togel, padahal semua bentuk perjudian adalah ilegal dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Perjudian togel telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman; yang dulunya dimainkan secara offline, kini dimainkan secara online. Permainan togel online selain dijerat dengan pasal 303 KUHP bisa juga dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE kemudian sanksi pidanya terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, sebagian masyarakat cenderung menganggap judi sebagai sesuatu yang wajar karena sudah diterima secara luas di kalangan masyarakat Maluku Tengah, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu, peran serta polisi dalam memberantas permainan judi togel online menjadi sangat penting. Namun dalam praktiknya, Polres Maluku Tengah terbukti kurang efektif dalam menangani masalah tersebut, karena hanya akan melibatkan 2 (dua) kasus togel online pada tahun 2021 dan 3 (tiga) kasus pada tahun 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris/sosilogis. Menurut Bambang Waluyo, Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>4</sup> Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian mengidentifikasi masalah dan penyelesaiannya.<sup>5</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah**

Satjipto Rahardjo mengklaim bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk melaksanakan kehendak hukum. Bahwa yang dimaksud dengan keinginan hukum dalam konteks ini tidak lain adalah gagasan-gagasan yang dikemukakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Pengertian penegakan hukum juga dapat dipahami dari segi peruntukannya, yaitu dari segi hukum. Ada makna luas dan spesifik dalam hal ini. Secara umum, penerapan hukum juga mempertimbangkan asas-asas keadilan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun dalam pengertian yang sempit, menerapkan hukum hanya berarti mengikuti persyaratan formal dan tertulis. Penegakan hukum dan keadilan memiliki arti yang berbeda dalam bahasa ibu. Dalam pengertian yang lebih umum, konsep “hukum yang berlaku” dapat dikaitkan dengan penerapan hukum, yang disebut juga dengan “penerapan keadilan dalam arti hukum material”. Di dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.15.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. h. 155.

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, h. 25

antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup> 1) Adanya kepastian hukum Untuk mencapai kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum adalah pertahanan yang dibenarkan terhadap perilaku sewenang-wenang untuk memastikan bahwa seseorang menerima apa yang wajar dalam keadaan; 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum harus menawarkan keuntungan atau tujuan ketika dipraktikkan atau ditegakkan sehingga orang dapat memahami mengapa hukum itu dibuat; 3) Keadilan (*gerechtigheit*) Hukum itu mencakup semua, berlaku universal, dan menggeneralisasi. Aspek keadilan harus diperhatikan dalam menjalankan atau menegakkan hukum karena tidak ada gunanya memiliki hukum tanpa keadilan. Di dalam penegakan hukum terhadap perjudian togel *online* pada wilayah Polres Maluku Tengah faktor-faktor yang telah disebutkan sangat mempengaruhi proses penegakan terhadap perjudian *online*.

#### a) Faktor hukum atau undang-undang

Keadilan dan kepastian hukum terkadang dapat berbenturan dalam pelaksanaan penegakan hukum di dunia nyata. Hal ini karena kepastian hukum merupakan suatu teknik yang telah ditetapkan secara normatif, sedangkan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang abstrak. Di Indonesia dikenal dengan asas legalitas atau undang-undang tidak berlaku surut yang menyatakan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk hal-hal yang secara khusus tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang perjudian diatur didalam Pasal 303 KUHP, selain di dalam KUHP perjudian secara online juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU no 11 tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 Tentang ITE. Sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku maka pelaku perjudian togel online di wilayah polres Maluku Tengah yang tertangkap dapat diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### b) Faktor Penegak Hukum

Efektivitas personel penegak hukum sangat penting untuk cara kerja hukum. Tidak diragukan lagi akan ada masalah dengan proses penegakan hukum meskipun peraturan yang berlaku sudah baik dan para penegak hukumnya berkualitas tinggi. Akibatnya, penegakan hukum yang efektif adalah salah satu kemenangan dalam menegakkan dan menerapkan mentalitas hukum. Di dalam konteks yang menyangkut penegakan hukum togel online di wilayah Polres Maluku Tengah, penegak hukum yang dimana adalah kepolisian sudah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik secara prosedural akan tetapi kurangnya personil yang berkompeten di bidang IT dan tidak adanya unit *cyber crime* menjadi salah satu problem yang menjadi hambatan dalam memberantas pelaku perjudian togel online padahal kita tahu bahwa perjudian togel online masuk dalam kejahatan *cyber crime* yang dimana memerlukan orang-orang berkompeten dalam bidang *cyber* atau informasi dan teknologi (selanjutnya disebut IT) dalam memberantasnya walaupun memang pihak polres sendiri sudah sering melakukan patroli *cyber* akan tetapi keberadaan orang-orang yang berkompeten didalamnya akan lebih bagus dalam proses pemberantasan perjudian togel online.

#### c) Faktor Sarana dan Prasarana

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Yogyakarta, Liberty, 2008, h. 160-161.

Perangkat lunak dan perangkat keras merupakan unsur sarana dan prasarana penunjang yang sangat penting bagi penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah siber. Komputer atau laptop yang memadai, tentu saja, merupakan perangkat keras yang paling penting.

Sesuai dengan keterangan Bripka Susanto pihak polres Maluku Tengah memang sering melakukan patroli cyber akan tetapi dengan alat yang seadanya saja<sup>8</sup>. dengan alat seadanya sudah barang tentu patroli cyber yang dilakukan akan kurang optimal, terbukti walaupun sering melakukan patroli *cyber* akan tetapi pelaku perjudian togel online yang ditangkap bukan dari hasil patroli *cyber* melainkan langsung tangkap tangan berkat informan dari luar. Oleh karena itu sarana dan fasilitas sangat mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum, apalagi suatu kejahatan yang dimana tergolong dalam kejahatan *cyber crime*. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai sudah barang tentu tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor Prasaran atau anggaran operasional juga menjadi penghambat yang sangat krusial adalah terbatasnya dana anggaran operasional, jumlah anggaran yang kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus perjudian togel *online*, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk pengungkapan kasus-kasus tindak pidana perjudian.

#### d) Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Setiap individu atau kelompok setidaknya mengetahui hukum; masalahnya adalah apakah mereka mengikutinya ke tingkat yang tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Rendah atau tingginya kesadaran hukum di masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum.

Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam penegakan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas ketentuan hukum dalam pelaksanaannya. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum. Pendapat masyarakat umum adalah bahwa mereka tidak mengetahui tanggung jawab polisi, tidak mendukung mereka, dan umumnya acuh tak acuh. Mereka juga percaya bahwa penegakan hukum sepenuhnya adalah urusan polisi dan ragu-ragu untuk terlibat sebagai saksi atau dengan cara lain. Salah satu kendala penegakan hukum adalah ini.

Sangat menantang untuk mematahkan kecanduan manusia terhadap perjudian karena sudah tertanam dalam sifat kita. Saat ini kejahatan judi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi. Mengingat berbagai tantangan yang mereka hadapi, penegakan hukum merasa sangat sulit untuk menangani kejahatan perjudian. Hambatan ini datang dalam bentuk kurangnya pengetahuan umum tentang perjudian dan undang-undang yang mengaturnya, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan di kalangan masyarakat umum, dan kurangnya kerja sama dengan organisasi penegak hukum yang membuat organisasi tersebut memiliki sedikit akses ke informasi tentang perjudian.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Susanto, BA Unit 1 Tipidup, 6 Februari 2023



e) Server yang Diletakan di Negara-Negara Melegalkan Judi

Tindak pidana perjudian *online*, server merupakan tempat untuk bermain judi secara online dalam bentuk website. Website inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara *online*. Server yang dibuat oleh bandar judi *online* sering kali diletakan di Negara-Negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Thailand, Singapura dan negara lainnya yang melegalkan perjudian, hal inilah yang menjadi penghambat Kepolisian di Indonesia untuk melacak Bandar bandar pemegang server judi *online* tersebut.<sup>9</sup>

**B. Upaya Penanggulangan Perjudian Togel Online Oleh Polres Kabupaten Maluku Tengah**

Dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian sangat berperan dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online di wilayah Maluku Tengah. Dengan melakukan pekerjaan preventif (pengawasan, penyuluhan) dan tugas represif (penyelidikan, penyidikan, penyergapan, dan penjatuhan hukuman), polisi dapat mengalahkan permainan togel online.<sup>10</sup>

**Tabel 1.**

<b>Data Tindak Pidana Perjudian Yang Di Tangani Polres Maluku Tengah</b>		
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	2021	2
2	2022	3
3	Jumlah	5

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya penanganan perjudian togel online pada Polres Maluku Tengah dari tahun 2021 sampai 2022 terdapat lima (5) kasus, yakni pada tahun 2021 terdapat dua (2) kasus dan tahun 2022 terdapat tiga (3) kasus, peran dari para pelaku disini ialah sebagai sub agen atau yang biasa kita sebut bandar. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bripka Susanto, Undang-Undang yang dipakai untuk memidanakan para pelaku judi togel online adalah KUHP dan UU ITE, namun cenderung menggunakan KUHP, khususnya pada pasal 303 ayat (1) ke 1 dan ke 2, walaupun sarana yang digunakan juga memanfaatkan teknologi internet, yang mana menurutnya hal ini juga berdasarkan petunjuk jaksa tentang perbuatan para pelaku judi togel online masih memenuhi unsur 303 KUHP. Ancaman pidana, yang tertuang didalam Pasal 303 KUHP yaitu maksimal 10 tahun.

Peran ke-5 (lima) pelaku adalah sebagai sub agen. Pada proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap ke 5 (dua) tersangka tersebut, UU yang sangkakan untuk memidanakan pelaku yaitu KUHP khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 dan atau pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Masohi untuk 2 (dua) perkara judi Togel online pada tahun 2021, yaitu sanksi pidana selama 7 bulan dan 8 bulan. Sedangkan 3 pelaku yang ditangani pada tahun 2022 masih dalam proses persidangan. Terkait penanganan perkara judi togel online pada tingkat penyidikan dalam hal saksi ahli yang

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Susanto, BA Unit 1 Tipidup, 6 Februari 2023

<sup>10</sup> Muliadi Irwan, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian", Fakultas Hukum Hassanudin Makassar, 2017

dimintai keterangan yaitu saksi ahli ITE Ahli ITE yang dimintai keterangannya yaitu dari Surabaya dan Makassar<sup>11</sup>.

Hasil wawancara dengan Briпка Susanto (BA Unit 1 Tipidum) pada tanggal 6 febuari 2023:

- 1) Dari tahun 2021-2022 ada 5 kasus togel *online* yang ditangani Polres Maluku Tengah, yakni pada tahun 2021 terdapat dua (2) kasus yang ditangani dan tahun 2022 terdapat tiga (3) kasus.UU yang disangkakan untuk memidanakan ke lima (5) pelaku yaitu KUHP khususnya pasal 303 ayat (1) ke 1 dan ke 2 dan atau atau pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
- 2) Barang bukti yang ditemukan Kepolisian ialah *handphone* (hp) yang memeiliki aplikasi atau situs yang tersambung untuk bermain judi togel online
- 3) Untuk Polres Maluku Tengah Sendiri Belum memiliki tim khusus *cyber*, akan tetapi pihak kepolisian tetap melakukan patroli *cyber* dengan alat seadanya.
- 4) Upaya kepolisian Polres Maluku Tengah Dalam Penaggulangan atau memberantas perjudian togel online ada 2 yakni upaya penal atau yang biasa disebut represif dan upaya non penal atau biasa disebut preventif.
- 5) Untuk upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi di masyarakat ataupun disekolah dilakukan oleh Satuan Binmas.

Penegakan hukum tidak lepas dari faktor penghambatnya dan dalam penegakan hukum di wilaya Polres Maluku Tengah ada bebrapa faktor yang membengaruhi penegakan hukum yakni: SDM, sarana dan fasilitas, anggaran opsional, server yang berada di negara melegalkan judi, dan kepuhlian masyarakat itu sendiri.

Tujuan bidang preventif adalah agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tanpa terganggu oleh setiap aktivitasnya. Hal itu dilakukan dengan memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa peluang bagi pelaku kejahatan tidak terpenuhi dan tidak ada kejahatan atau kejahatan yang dilakukan. Penyidikan kejahatan dan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang merupakan tugas di bidang represif. Mandat kepolisian dalam bidang penegakan hukum adalah menjalankan fungsi represif.<sup>12</sup>

Adapun upaya-upaya tersebut yakni:

#### a. Upaya Pencegahan Preventif

Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan perilaku yang sangat berbahaya yang mengganggu lingkungan itu sendiri. Konsekuensinya, tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang begitu saja di tengah-tengah masyarakat kita. Upaya preventif ini bertujuan agar perjudian tidak masuk ke masyarakat dan meluas. Akibatnya, ini bertujuan untuk menghentikan orang dari terlibat dalam kejahatan terkait perjudian karena begitu seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal, sangat sulit bagi mereka untuk kembali menjadi orang baik karena kecenderungan yang sangat rendah untuk melakukannya. Konsekuensinya, upaya pencegahan ini sangat penting, namun pencegahan tetap lebih unggul dari pengobatan. Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian, Walaupun sampai sekarang belum dapat

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Briпка Susanto BA Unit 1 Tipidum, 6 Febuari 2023

<sup>12</sup> Sudjino, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Surabaya : mediatama, 2005, h. 117

diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus dilaksanakan.

#### b. Upaya Penanggulangan Represif

Penanggulangan represif adalah semua upaya untuk membantu seseorang yang telah berubah buruk kembali ke jalan yang benar untuk mencegahnya mengulangi perbuatannya. Sementara langkah-langkah preventif, dalam contoh perjudian togel online ini, telah diambil untuk mengembalikan keseimbangan yang sempat terganggu, tindakan represif sangat diperlukan. Dalam situasi ini, seorang pemain togel membutuhkan pembinaan dan arahan dari organisasi seperti Bina Partners, yang misinya adalah untuk membimbing dan menawarkan konseling kepada penduduk setempat. Wajar saja, pembinaan ini terus dilakukan hingga penjudi togel tersebut dibebaskan sebagai mantan narapidana, bukan saat ditangkap atau dipenjara. Ajaran ini harus diteruskan untuk mencegah pelaku melakukan aktivitasnya sekali lagi. Untuk melakukan pendampingan dan pembinaan tersebut, masyarakat sekitar (seperti tokoh agama) harus berperan secara signifikan.

Kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi aktivitas kriminal. Hukum pidana merupakan sarana yang rasional untuk memberantas kejahatan, karena berfungsi untuk menegakkan rasa keadilan dan efisiensi. Sebagai respon yang dapat ditawarkan kepada pelaku kejahatan, berbagai cara digunakan untuk memberantas kejahatan<sup>13</sup>.

Dalam perkara tindak pidana perjudian togel online, upaya penal yang dilakukan Polres Maluku Tengah sesuai dengan penerapan Pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serupa dengan tindak pidana perjudian melalui jaringan internet (*online*) yang telah jelas dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bagi setiap orang yang melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) "dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Polisi harus bertindak cepat untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan mereka memainkan peran kunci dalam melakukan upaya tersebut dengan mengumpulkan data dari laporan masyarakat. Mendengar dan menerima pengaduan tersebut, banyak petugas kepolisian yang langsung melakukan penyelidikan. Mayoritas laporan yang diterima polisi adalah laporan lisan atau laporan yang dilakukan melalui jaringan ponsel. Sesuai dengan petunjuk dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, penyidik kemudian membukukan laporan tersebut dan baik pelapor maupun penyidik menandatangani. Saat melakukan penyelidikan, polisi meluncur ke tempat kejadian untuk menentukan apakah klaim publik tentang terjadinya pelanggaran perjudian itu akurat. Mereka kemudian menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut sebelum mengumpulkan data dan saksi.

## KESIMPULAN

---

<sup>13</sup> Hermon N. H. Hutasoit, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 8



Peran Polres Maluku Tengah dalam penegakan hukum terhadap perjudian togel *online* pada Polres Maluku Tengah sudah dilaksanakan sesuai paraturan perundang-undangan, namun dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perjudian togel online peran Polres namun masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perjudian togel *online* pada Polres Maluku Tengah antara lain faktor hukum itu sendiri atau undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan Server yang Diletakan di Negara-Negara Melegalkan Judi. Upaya penanggulangan perjudian togel online yang dilakukan Polres Maluku Tengah melalui Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif meliputi memberikan himbauan dan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarkat mengenai perjudian *online* serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian *online* tersebut. Upaya represif meliputi penerapan sanksi kepada pelaku perjudian togel online dengan menerapkan Pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP dan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## REFERENSI

### Jurnal

Denny Lautumaerissa, Carolina Tuhumury, Jetty Martje Patty, “ *Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi)*”, Fakultas Hukum Univesitas Patttimura, Vol 7 No 2 (2021), 239, <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page236-255>

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016

Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Yogyakarta, Liberty, 2008

Sudjino, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Surabaya : mediatama, 2005

### Skripsi, Tesis, Disertasi, Online, dll

Hermon N. H. Hutasoit, *Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Perjudian Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Muliadi Irwan, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidan Perjudian*, Fakultas Hukum Hassanudin Makassar, (2017)

Sugeng Tiyarto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulaan Perjudia*, semarang Universitas Dipenogora, (2006).